

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEGASAN JUDUL

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul serta untuk menghindari deviasi pembahasan penulisan skripsi ini, perlu kiranya penulis menegaskan beberapa istilah yang ada dalam judul di atas:

1. Partai

Partai berasal dari bahasa Inggris *part* yang berarti bagian.¹ Secara terminologis partai berarti kumpulan sebagian orang yang memiliki asas, haluan, pandangan, serta tujuan yang sama di bidang politik.² Sedangkan UU tentang partai politik menyebutkan partai sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.³

¹ Riswanda Imawan, Kata pengantar: *Membedah Politik Orde Baru; Catatan Dari Kaki Merapi*, Agus dan Kuswaidi Syafie (ed.), Cet. I (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997).

² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991). Hal. 1099.

³ *Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik*, (Jakarta : BP Cipta Jaya, 2003). Hal. 6.

2. Media

Media memiliki arti perantara, penyaluran, penghubung, sarana penghubung informasi seperti majalah, surat kabar, radio, dsb.⁴ Media dalam konteks penelitian ini adalah media yang memposisikan partai sebagai fungsi perantara dalam proses dakwah islamiyah.

3. Dakwah

Istilah dakwah, secara etimologis berasal dari bahasa Arab "*da'a, yad'u, da'watan*" yang mempunyai arti seruan, ajakan atau panggilan. Oleh karena itu secara terminologis 'dakwah berarti penyiaran agama di kalangan masyarakat dan pengembangannya, seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama.⁵

Dakwah dalam kerangka pikir di atas adalah dakwah Islam. Adapun kata Islam diterjemahkan dengan penyerahan diri kepada Tuhan atau bahkan kepasrahan. Secara etimologis dalam bahasa Arab kata Islam juga berarti menyerahkan sesuatu kepada seseorang, di sini Islam adalah masalah "memberikan keseluruhan jiwa (raga) seseorang kepada Tuhan". Islam secara terminologis merupakan agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw., memuat seperangkat nilai ajaran dan aturan untuk

⁴ *Ibid.* Hal. 954.

⁵ Pusat dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990). Hal. 181.

membimbing arah kehidupan manusia menuju pada kebaikan dunia dan akhirat.⁶

Dari penjelasan di atas, maka istilah gerakan dakwah yang dimaksud dalam judul di atas adalah suatu kegiatan bertindak dalam usaha mengajak agar umat manusia menerima, mempercayai keyakinan dan pandangan hidup Islam. Atau lebih detail dapat kita ikuti pendapat dari H.M.S Nasarudin Latif sebagaimana dikutip Rafiuddin dan Maman Abdul Djaliel yang mendefinisikan dakwah sebagai "Setiap usaha atau aktifitas dengan lisan atau tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah swt., sesuai garis-garis aqidah dan syari'ah serta akhlak islamiyah."⁷

4. Studi

Studi berasal dari bahasa Inggris *study* yang berarti belajar. Studi juga berarti kajian, telaah, penelitian dan penyelidikan ilmiah.⁸ Maksud dari studi di atas adalah kajian atau telaah yang akan membahas suatu topik yaitu konsep dan gerakan dakwah Partai Keadilan Sejahtera DPW Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Konsep

⁶ Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam*, (Yogyakarta : LPPI-Pustaka Pelajar, 1996). Hal. 17.

⁷ Isa Anshari, *Mujahid Dakwah*, (Bandung : PT. Diponegoro, 1995). Hal. 17.

⁸ Pusat, *Kamus Besar...* Hal. 860.

Konsep merupakan ide atau pendapat yang diabstrakan melalui peristiwa nyata atau dapat diartikan pula pemikiran yang umum.⁹

Konsep dalam penelitian ini berarti sebagai sebuah pemikiran yang umum. Yaitu pemikiran global yang mendasari pergerakan Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Dakwah, yaitu memfungsikan partai sebagai media dakwah Islamiyah. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang kerangka kerja yang mendasari setiap aktifitas partai.

6. Gerakan

Gerakan adalah usaha atau kegiatan dalam lapangan sosial (politik dan sebagainya).¹⁰ Gerakan dakwah dalam lapangan politik (partai) seringkali mengalami deviasi dari idealitas tujuan yang sesungguhnya. Hal ini dikarenakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan partai selalu mengibarkan bendera partai politik tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan selalu diidentikkan dengan kegiatan dalam usaha mencari dukungan dan atau massa dan bukan atas dasar kemanusiaan.

Konteks partai sebagai media dakwah, memberikan pengertian bahwa dalam hal ini partai berfungsi sebagai sarana atau alat yang digunakan untuk berdakwah. Hal ini kemudian memberikan sebuah batasan bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan partai dakwah haruslah dilandasi dengan semangat kemanusiaan dan solidaritas antar sesama manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman sebagai cita-cita

⁹ Peter Salim, *Kamus ...* Hal. 764.

¹⁰ Peter Salim, *Kamus...* Hal. 469.

dakwah, dan bukan didasarkan pada usaha untuk mencari dukungan massa semata.

Namun demikian, klasifikasi antara aktifitas pencarian massa dan aktifitas dakwah akan sulit dilakukan karena keduanya sering dijadikan tujuan secara bersamaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Namun, akan lain halnya jika partai tersebut mempunyai komposisi dan fungsi keanggotaannya sebagai kader. Partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah diterapkan.¹¹ Sehingga seluruh kegiatannya akan selalu dilandasi oleh doktrin yang dimiliki oleh partai.

Kegiatan-kegiatan itu dapat berbentuk seperti seminar dan kajian, bakti sosial, pemberian santunan pada yang membutuhkan, gerakan pertolongan kepada masyarakat yang terkena musibah dan lain-lain.

7. Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 1999 bernama Partai Keadilan yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998.¹² Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera didirikan kemudian pada tanggal 20 April 2003 oleh kader Partai Keadilan yang didedikasikan sebagai penerus perjuangan Partai

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet VII (Jakarta: PT. Gramedia, 1982). Hal. 166.

¹² *Sekilas Partai Keadilan*, (Jakarta : Sekretariat DPP Partai Keadilan, 1998). Hal. 7.

Keadilan.¹³ Karena Undang-Undang Pemilu Nomor 13 Tahun 2003 memberlakukan *Electoral Threshold*,¹⁴ maka Partai Keadilan harus berganti wajah menjadi Partai Keadilan Sejahtera untuk dapat mengikuti Pemilu 2004.

Dari keseluruhan rangkaian kosakata yang terdapat dalam judul maka dapat diperoleh pemahaman bahwa dari judul skripsi di atas penulis akan membahas partai yang merupakan sebuah institusi politik sebagai media partisipasi politik rakyat dalam sebuah kerangka fungsi media yaitu sebuah perangkat atau sarana untuk melakukan aktifitas menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah swt., sesuai garis-garis aqidah dan syari'ah serta akhlak islamiyah.

Untuk mempertajam pembahasan penulis mengambil studi kasus Partai Keadilan Sejahtera DPW Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. IPDA Tut Harsono (Timoho) no. 32, Yogyakarta 55165, sebagai obyek penelitian. Yaitu dengan menguraikan secara mendalam tentang ide, pendapat atau pemikiran umum serta usaha dan kegiatan Partai Keadilan Sejahtera DPW DI Yogyakarta dalam aktifitasnya sebagai partai dakwah.

¹³ Brosur: *Sekilas Jati Diri Partai Keadilan Sejahtera*, diterbitkan oleh DPW Partai Keadilan Sejahtera DI Yogyakarta.

¹⁴ Ketentuan *electoral threshold* mengatur tentang tidak diperbolehkannya partai peserta Pemilu 1999 yang memperoleh suara kurang dari 2% suara nasional untuk mengikuti Pemilu 2004. Partai Keadilan (PK) meraih 1.436.565 suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten atau 1,36%).

Diambilnya DPW Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai obyek karena *pertama*, dari tinjauan sejarah Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia dimana kalangan *usroh* yang merupakan *embrio* dari Partai Keadilan Sejahtera, mulai melakukan aktifitasnya untuk berkembang menjadi sebuah partai. Oleh sebab itu, diharapkan penggalan data yang bersifat historis akan mudah dilakukan.

Kedua, seperti yang telah kita ketahui bahwa Partai Keadilan Sejahtera mempunyai basis massa dari kaum pelajar dan intelektual muda kampus, oleh sebab itu Yogyakarta sebagai kota pelajar merupakan salah satu kantong massa yang dimiliki oleh Partai Keadilan Sejahtera. Dari jumlah massa yang besar tersebut maka gerakan dakwah yang dilakukanpun semakin masif. Sehingga data tentang konsep dan gerakan dakwah Partai Keadilan Sejahtera mudah untuk diakses.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Carut marutnya keadaan Indonesia dengan berbagai krisis yang mendera menjadikan Indonesia mengalami berbagai dekadensi di berbagai sisi kehidupan bangsanya. Keadaan ekonomi dan politik yang labil diiringi dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, berujung pada permasalahan moral pada tingkat pemimpin maupun masyarakatnya. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban serta tindakan kriminal selalu mengiringi perjalanan bangsa yang tengah mengalami masa transisi ini.

Islam sebagai sebuah agama *rahmatan lil 'alamin* merupakan sebuah sistem yang universal yang mencakup seluruh sisi kehidupan.¹⁵ Oleh karena itu, agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia ini, dipandang sebagai jalan keluar dari semua permasalahan moralitas yang dihadapi oleh negara ini dengan seluruh tata nilai yang dimilikinya.

Derap langkah reformasi telah membawa iklim baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala bidang. Kungkungan politik yang selama ini membelenggu telah lumpuh tak berdaya. Akibatnya, berbagai aspirasi bermunculan untuk menghirup udara segar kebebasan. Partai-partai yang menjadi saluran aspirasi politik bangsa seakan-akan bangkit dari kuburnya sebagai media penyalur aspirasi rakyat.¹⁶

Lengsernya Soeharto memungkinkan iklim kebebasan mulai terkuak. Umat Islam mulai bangkit untuk mencoba memperjuangkan kembali aspirasinya dan menegakkan nilai-nilai Islam demi perbaikan nasib bangsa. Salah satu di antara mereka adalah Partai Keadilan Sejahtera.

Partai Keadilan Sejahtera bermula dari gerakan-gerakan keislaman yang mengambil masjid-masjid sebagai basis operasional dan strukturalnya. Gerakan dakwah ini merebak dari tahun ke tahun mewarnai suasana keislaman di kampus-kampus dan masyarakat umum. Gejolaknya muncul dalam bentuk pemikiran

¹⁵ Abu Al-A'la Al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1996). Hal. 15.

¹⁶ Kemunculan partai politik modern merupakan resultante dari serangkaian proses perubahan sosial ekonomi dan politik dari masyarakat dari mana partai itu muncul. Lihat Urmaid Rodi, *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politikk Islam Tingkat Nasional*, (Jakarta : Integrita Press, 1984). Hal. 17.

keislaman dalam berbagai bidang dan juga praktik-praktik pengamalan ajaran sehari-hari. Persaudaran (*ukhuwah*) yang dibangun di antara mereka menjadi sebuah alternatif cara hidup di tengah-tengah masyarakat yang semakin individualistik. Sementara komitmen mereka terhadap nilai-nilai moral pun menjadi warna khas di tengah-tengah badai faham materialistik yang melahirkan perilaku hedonistik.

Tatkala gerakan dakwah ini semakin membesar dan mengental, maka bidang-bidang yang digelutinyapun semakin luas. Di kancah masyarakat mereka berupaya membangun ruh keislaman melalui media tabligh, seminar, aktivitas sosial, ekonomi dan juga pendidikan. Sementara dalam bidang politik mereka mencoba menyadarkan kepada masyarakat muslim, terutama pemuda dan mahasiswa, akan tanggung jawabnya terhadap masa depan bangsa.¹⁷

Menghadapi sekian permasalahan moral yang tengah dihadapi oleh bangsa, partai yang bermula dari komunitas *halaqah* dan *usrah* ini akhirnya menetapkan dirinya sebagai sebuah partai dakwah. Partai dakwah dalam hal ini berarti bahwa misi dakwah merupakan tujuan utama dan partai merupakan sebuah media. Dengan mengusung politik moral sebagaimana digagas oleh pendirinya, maka Partai Keadilan Sejahtera berusaha menjadikan komitmen moral sebagai ciri seluruh perilaku individu dan politiknya. Partai Keadilan Sejahtera berupaya menampilkan sisi moralitas yang bersumber pada nilai-nilai Islam ini sebagai basis serta keteladanan.

¹⁷ *Sekilas Partai Keadilan...* Hal. 17-18.

Misi dakwah islamiyah secara substansial mengajak seluruh umat manusia untuk selalu menjunjung tinggi moralitas yang bersumber pada nilai-nilai keislaman. Hal ini senada dengan apa yang telah dirumuskan Partai Keadilan Sejahtera sebagai sebuah landasan pendirian partai. Dalam pandangannya, krisis yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia merupakan akibat dari dekadensi moral dari pemimpin dan rakyat Indonesia. Segala bentuk ketimpangan dan ketidak seimbangan hidup itu merupakan buah dari kezaliman dan kekufuran yang dilakukan manusia.

Berangkat dari hal tersebut, maka moralitas merupakan hal yang paling penting untuk dibangun. Gerakan dakwah yang signifikan merupakan sebuah alternatif langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Namun demikian konsep dakwah yang dikembangkan haruslah dapat menyentuh di semua lini, termasuk di dalamnya lini birokrasi dan pemerintahan. Setelah sekian lama menggunakan komunitas *halaqoh* dan *usrah* sebagai media dakwah, maka Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa telah tiba saatnya untuk memperluas gerakan dakwahnya ke wilayah politik.

Dari sekian paparan di atas, maka kami tertarik untuk membahas fenomena "Partai Dakwah"¹⁸ Partai Keadilan Sejahtera. Selama ini partai memiliki wajah yang negatif bagi sebagian kalangan. Karakternya yang kotor, menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan demi kekuasaan menjadikannya dijauhi oleh orang yang pernah menjadi korban permainan kotornya serta orang

¹⁸ Khalid Novianto, *Era Baru Indonesia; Sosialisasi Pemikiran Amin rais, Hamzah Haz, Nurmahmudi, Matori Abdul Jalil, Yusril Ihza Mahendra*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999). Hal. 106.

yang enggan untuk berbuat tidak baik dan jauh dari kejujuran. Dakwah yang selalu diasosiasikan sebagai aktifitas untuk menyerukan kebajikan seolah bertolak belakang dengan anggapan miring tentang partai.

Perolehan suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2004¹⁹ setidaknya telah membuktikan bahwa masyarakat Indonesia bersimpati pada aktifitas yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera yang notabennya adalah sebuah partai.

Dari beberapa uraian di atas maka kami berkesimpulan bahwa partai cukup efektif untuk mewujudkan cita-cita dakwah dalam rangka menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang bernafaskan Islam.

C. RUMUSAN MASALAH

Fenomena yang muncul dari dideklarasikannya Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah, memberikan sebuah dimensi berbeda dengan digunakannya partai sebagai media dakwah. Berbagai anggapan miring dari berbagai kalangan tentang partai merupakan sebuah komparasi menarik bagi fenomena ini. Oleh sebab itu, konsep dan gerakan dakwah Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu hal menarik untuk dibahas. Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi partai sebagai media dakwah islamiyah?
2. Bagaimana konsep dan gerakan dakwah islamiyah Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta ?

¹⁹ Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu Legislatif tahun 2004 memperoleh suara sebanyak 8.325.020 suara, atau 7,34% dari seluruh perolehan suara. Perolehan suara itu meningkat tajam (sekitar 600%) bila dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu tahun 1999 yang hanya memperoleh 1.436.565 suara (1,36%). *Republika*, Kamis, 6 Mei 2004. Hal. 5.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan

- a. Mengetahui dan mendeskripsikan partai sebagai media dakwah, khususnya dalam kerangka sebagai media penyeru kebajikan.
- b. Mengetahui dan menggambarkan konsep dan gerakan dakwah Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah.

2. Kegunaan

Setiap penelitian yang dilakukan harus mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Hal itu dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat tidak hanya bagi penelitiannya saja, melainkan juga bermanfaat bagi orang lain. Dari penelitian ini peneliti berharap dapat berguna untuk:

- a. Memberikan sumbangan ilmiah berupa wacana politik aktual yang berusaha memberikan pandangan berbeda dari eksistensi partai sebagai media partisipasi politik sekaligus sebagai media dakwah dalam usaha mentransformasikan nilai-nilai keagamaan, sehingga memberikan pemahaman baru tentang partai politik.
- b. Ingin memberikan sumbangan pemikiran terhadap masalah-masalah sosial dari sisi penyelenggaraan pemerintahan yang diawali dari sebuah fenomena partai politik sebagai salah satu usaha untuk mengentaskan bangsa dan negara Indonesia dari keterpurukan yang sedang melanda.

E. TELAAH PUSTAKA

Sebelum membahas lebih lanjut, untuk menghindarkan dari penelitian yang sama dalam satu obyek, penulis akan menelaah karya-karya lain yang membahas tentang Partai Keadilan Sejahtera.

Partai Keadilan Sejahtera, pertama kali muncul dengan nama Partai Keadilan, adalah salah satu partai baru yang cukup mendapat perhatian dari berbagai kalangan karena karakter yang berbeda dengan partai lain. Berbagai karya dari para tokoh telah banyak muncul dalam usaha mencermati fenomena Partai Keadilan dengan menggali data tentang profil, kiprah dan pergulatan politiknya di tingkat nasional.

Buku paling lengkap dalam menggambarkan tentang Partai Keadilan adalah *Sekilas Partai Keadilan*.²⁰ Buku ini merupakan buku resmi yang dikeluarkan Partai Keadilan sebagai langkah sosialisasi partai kepada masyarakat. Memuat di dalamnya latar belakang sejarah, karakteristik partai, prinsip dasar, serta visi dan misi partai. Buku ini juga mencantumkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diikuti dengan agenda Partai Keadilan dalam rangka menyikapi kondisi nasional dalam beberapa bidang.

Sedangkan buku lain yang membahas tentang Partai Keadilan di antaranya adalah *Tujuh Mesin Pendulang Suara*.²¹ Buku ini memaparkan tujuh partai yang diprediksikan mampu meraih suara pada Pemilu 1999. Prediksi didasarkan pada pengamatan atas kesiapan partai menghadapi Pemilu, baik dari

²⁰ *Sekilas Partai Keadilan*, Cet. I (Jakarta : DPP Partai Keadilan, 1998)

²¹ Hairus Salim dkk (ed) *Tujuh Mesin Pendulang Suara; Perkenalan Prediksi Harapan Pemilu 1999*, (Jogjakarta : LKiS, 1999).

sisi visi, misi, maupun arah program kepartaian yang salah satunya adalah Partai Keadilan. Namun demikian pembahasan yang ada hanya sebatas deskripsi awal yang berasal dari data formil.

Kholid Novianto dengan bukunya *Era Baru Indonesia; Sosialisasi Pemikiran Amin Rais, Hamzah Haz, Matori Abdul Jalil, Nurmahmudi, Yusril Ihza Mahendra*²² juga mencoba memberikan gambaran umum atas beberapa partai Islam peserta Pemilu termasuk di dalamnya Partai Keadilan. Dalam usaha memberikan diskripsinya, buku ini cenderung lebih memberikan penekanan kepada usaha memberikan gambaran partai melalui figur para ketuanya, latar belakang, sejarah dan perjuangan atau arah program kepartaian masing-masing.

Ada pula skripsi yang membahas tentang Partai Keadilan yang disusun oleh Muhammad Isa dengan judul *Partai Keadilan Dalam Perspektif Politik Islam (Studi atas AD/ART Partai Keadilan)*.²³ Sesuai dengan judulnya skripsi ini membahas tentang Partai Keadilan dengan menganalisa AD/ART Partai yang kemudian yang dibedah dengan perspektif fiqh siyasah. Skripsi ini juga memuat beberapa kebijakan partai tentang beberapa polemik yang terjadi di tanah air seperti kepemimpinan wanita dan sekitar polemik Piagam Jakarta mengenai pencantuman tujuh kata dalam Pancasila tentang pemberlakuan syari'at Islam bagi para pemeluknya.

Skripsi yang lain adalah skripsi yang disusun oleh Yadi Kurniadi yang berjudul *Komunikasi Politik Islam; Studi Analisis Dakwah Politik Partai*

²² Khalid Novianto, *Era Baru...*

²³ Muhammad Isa, *Partai Keadilan Dalam Perspektif Politik Islam (Studi Atas AD/ART Partai Keadilan)*, (Yogyakarta : Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

*Keadilan DIY.*²⁴ Skripsi ini membahas tentang gerakan dakwah Islam hubungannya dengan pola komunikasi politik yang dilakukan Partai Keadilan.

Dari koleksi buku dan karya tulis di atas maka penulis berkesimpulan bahwa pembahasan mengenai partai sebagai media dakwah yang disandarkan pada konsep dan gerakan dakwah Partai Keadilan Sejahtera belum pernah dibahas oleh siapapun. Sehingga penulis secara spesifik akan menguraikan obyek ini untuk dapat lebih memahami tentang konsep dan gerakan dakwah Partai Keadilan Sejahtera secara khusus dan fiqh siyasah secara umum.

F. KERANGKA TEORITIK

1. Partai

a. Tinjauan Umum Mengenai Partai Politik

Untuk memahami partai politik perlu kiranya kita telaah konsep dasar partai politik. Banyak sekali batasan yang dibuat para ahli mengenai partai politik. Di antaranya: menurut Raymond Gafield Gettel dalam *political science*, "partai politik terdiri dari sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang memakai kekuasaan memilih bertujuan mengawasi pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum mereka".²⁵

Batasan yang cukup lengkap dikemukakan oleh Mark N. Hagopian, menurutnya partai politik adalah "suatu organisasi yang dibentuk untuk

²⁴ Yadi Kurniadi, *Komunikasi Politik Islam; Studi Analisis Dakwah Politik Partai Keadilan DIY*, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

²⁵ Soelistyani Abdul Ghani, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987). Hal. 115.

mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam rangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.²⁶

Kekuasaan rata-rata masuk dalam batasan partai politik para ahli. Kekuasaan selalu menyangkut *authority, control, capacity* dan *relationship*.

b. Batasan Partai Politik Islam

Arsekal Salim dalam penelitiannya mengajukan batasan partai politik Islam sebagai berikut:

Partai yang memakai label Islam (nama, asas dan tanda gambar), atau partai yang tidak memakai label Islam tetapi hakikat perjuangannya adalah terutama untuk kepentingan umat Islam tanpa harus mengabaikan kepentingan umat agama lainnya, atau partai yang tidak memakai label Islam dan programnya untuk kepentingan semua warga negara republik Indonesia, tetapi konstituen utamanya berasal dari umat Islam.²⁷

Sementara Al-Chaidar memberikan rumusan partai Islam sebagai berikut:

Partai Islam adalah partai yang dipimpin oleh tokoh Islam, memakai asas Islam maupun bukan Islam (ghoirul Islam) sebagai fundamen partai dan orientasi partai yang terbuka dan tertutup, yang menerima anggota dari berbagai kalangan dan yang hanya menerima anggota dari golongan Islam saja dan berusaha meraih simpati untuk merebut suara dari kalangan Islam, sebagai basis utama dukungan.²⁸

²⁶ Ichlasul Amal (ed.) *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 1996). Hal. 15.

²⁷ Arsekal Salim, *Partai Islam Dan Relasi Agama-Negara*, (Jakarta : Pusat penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, 1999). Hal. 8.

²⁸ Al Chaidar, *Pemilu 1999 Pertarungan Ideologis Partai-Partai Islam Versus Partai-Partai Sekuler*, (Jakarta : Darul Falah, 1998). Hal. Vi.

Untuk membuat batasan yang jelas mengenai partai politik Islam dari partai lainnya, penulis memandang nama, asas dan tanda gambar memang merupakan ciri pembeda tetapi lebih bersifat simbolis dan instrumental,²⁹ dan karenanya tidak cukup signifikan sebagai ukuran dalam menilai status distingtif partai Islam di antara sekian banyak partai. Maka dari tujuan dan program setiap partai adalah suatu kriteria yang perlu diperhatikan dalam melakukan kategorisasi partai Islam.

Dengan demikian batasan partai menurut penulis adalah partai yang dibentuk karena adanya persamaan aspirasi dan persepsi politik berdasarkan orientasi, nilai-nilai dan cita-cita keislaman untuk melaksanakan program dan kebijaksanaan sebagai garis perjuangan partai.

2. Tinjauan Teoritik Tentang Dakwah

a. Pengertian Dakwah

Kalau kita sering mengkaji literatur dakwah maka kita akan menemukan betapa banyak para ulama dan pemikir muslim yang mencoba memberikan pengertian dan hakikat dari dakwah. Di bawah ini dicantumkan beberapa di antaranya:

- 1) Dakwah Islam merupakan aktualisasi iman (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak manusia

²⁹ Terma instrumental berarti jika suatu partai tidak lagi dapat menampung aspirasi politik umat, dapat saja umat meninggalkan partai itu. Baca Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung : Mizan, 1997). Hal. 74.

pada dataran kenyataan individual dan sosio kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu.³⁰

- 2) Dakwah adalah gerakan simultan dalam berbagai bidang kehidupan untuk mengubah *status quo*, agar nilai-nilai Islam memperoleh kesempatan untuk tumbuh demi kebahagiaan seluruh umat manusia.³¹
- 3) Dakwah itu merupakan suatu perjuangan hidup untuk menegakkan dan menjunjung tinggi undang-undang Ilahi dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan masyarakat, sehingga ajaran Islam menjadi *Shibghah* yang mendasari, menjiwai dan mewarnai seluruh sikap dan tingkah laku manusia dalam hidup dan kehidupannya.³²
- 4) Dakwah Islamiyah adalah mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan aqidah dan syari'at Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah sendiri.³³

Namun, dari berbagai definisi di atas yang perlu difahami adalah bahwa dakwah merupakan aktualisasi dan realisasi dari salah satu fungsi kodrati seorang muslim, yaitu fungsi kerisalahan. Sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, manusia mempunyai tanggung jawab untuk meneruskan

³⁰ Amrullah Ahmad (ed.), *Dakwah & Perubahan Sosial*, (Yogyakarta : Prima Duta, 1983). Hal. 2.

³¹ Amin Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung : Mizan, 1991). Hal. 26.

³² Farid Ma'ruf Noor, *Dinamika & Akhlak Dakwah*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1981). Hal. 29.

³³ Ali Hashmy, *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1994). Hal. 17.

perjuangan Rasulullah, yaitu dakwah. Inilah yang dimaksud dengan fungsi kerisalahan.

Fungsi kerisalahan tidak hanya berdimensi individual, melainkan pula sosial. Hal ini selaras dengan prinsip Islam yang mengatur keseimbangan antara tanggung jawab individu terhadap individunya sendiri dan individu terhadap lingkungan atau masyarakat di mana dia hidup.

Sudah menjadi sunnatullah bahwa dalam kehidupan bermasyarakat antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dalam berbagai urusan. Ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia telah memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat dari dan kepada masyarakat serta lingkungannya.³⁴

Di samping sebagai aktualisasi dan realisasi fungsi kerisalahan, dakwah juga dapat dipandang sebagai sebuah proses komunikasi karena pada tingkat (objek) individual kegiatan dakwah tiada lain adalah suatu kegiatan komunikasi, yaitu kegiatan penyampaian pesan berupa ajaran Islam dari seorang komunikator dalam hal ini adalah da'i kepada komunikan (*mad'u*) melalui media tertentu agar terjadi perubahan perilaku pada diri komunikan.

Perubahan-perubahan yang dimaksud akan meliputi pemahaman (pengetahuan/kognisi), penghayatan (afeksi), dan sikap serta perilaku (psikomotorik) individu yang telah menerima pesan. Dengan demikian perubahan yang terjadi akan menyangkut aspek aqidah, akhlaq, ibadah dan

³⁴ Farid Makruf Noor, *Dinamika dan Akhlaq Dakwah ...* . Hal. 17.

muamalah. Perubahan demikian terjadi karena adanya perubahan "tata nilai" mengenai apa yang dianggap baik, benar dan salah yang dianut seseorang.

Kemudian, dakwah sebagai sebuah proses perubahan manusia apabila perubahan nilai di atas juga terjadi pada tingkat masyarakat di mana sebagian besar anggota masyarakat bertindak berdasarkan kebenaran dan keadilan itu. Pada tingkat ini, proses perubahan nilai dimungkinkan sebagai akibat interaksi sosial antar individu anggota masyarakat, baik sebagai obyek maupun sebagai subyek dakwah.³⁵

Sebagai suatu proses perubahan sosial maka dakwah harus bersifat dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman sebab bagaimana ia dapat melakukan perubahan jika dakwah bersifat kaku terhadap setiap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, dakwah harus bersifat fleksibel dalam menghadapi suatu realitas zaman di manapun dan kapanpun.

Fleksibilitas dakwah terhadap realitas zaman bukan berarti kita akan melakukan perubahan terhadap sesuatu yang sudah mutlak di dalam Islam. Kita mengakui bahwa di dalam Islam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan sesuatu yang mutlak kebenarannya. Keduanya merupakan sumber nilai, sumber rujukan utama umat Islam sepanjang sejarah. Akan tetapi, pemahaman kita tentang keduanya tidaklah mutlak kebenarannya. Pemahaman kita sangatlah temporal dan lokal.³⁶

³⁵ Abdul Munir Mul Khan, *Ideologisasi Gerakan Dakwah*, (Yogyakarta : SIPRESS, 1996). Hal. 206.

³⁶ Jalaludin Rakhmat, *Islam & Era Informasi*, dalam Dedy Jamaluddin Malik & Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Hegemoni Budaya*, (Yogyakarta : Bentang Budaya, tt). Hal. 7.

Begitupun halnya dengan dakwah kita mengakui bahwa dakwah merupakan sesuatu yang mutlak kebenarannya karena kewajiban untuk melaksanakannya tertera di dalam kedua nash tersebut. Akan tetapi pemahaman kita tentang nash-nash mengenai dakwah itu tidaklah mutlak. Kondisi zaman dan masyarakat di mana dakwah akan dilaksanakan jelas berpengaruh terhadap metode, model dan media yang dipakai untuk berdakwah.

b. Kewajiban Dakwah

Dakwah merupakan bagian terbesar dari tugas-tugas keagamaan dalam kehidupan manusia dan masyarakat untuk merubah dan memperbaiki serta membangun kehidupan manusia dan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya. Oleh karena itu, berdakwah merupakan suatu perbuatan ihsan yang diwajibkan kepada setiap muslim untuk melaksanakannya.

Setiap muslim harus berdiri di garis terdepan serta memberikan andil besar dalam setiap usaha membangun kemakmuran dan kesejahteraan umat serta dalam memperbaiki kepincangan-kepincangan dan penyelewengan-penyelewengan, tetapi tidak ada usaha untuk memperbaiki, maka dalam pandangan Islam hal itu merupakan cerminan dari selemah-lemahnya iman.

Fungsi dan misi setiap muslim di dalam kehidupan masyarakatnya sangatlah besar dan berat sebab ia harus senantiasa berdiri di garis terdepan sebagai pejuang-pejuang penegak kebenaran dan keadilan.

Sebagai *khairu ummah*, setiap muslim baik individu maupun kolektif haruslah menjadi subjek dakwah dan bukannya menjadi objek yang

menerima dakwah, bukan pula hanya sebagai penonton-penonton aktif saja terhadap usaha pelaksanaan dakwah.

Sebagai 'inti' masyarakat, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk secara aktif menyeru manusia kepada kebenaran, memerintah melakukan perbuatan yang mungkar.³⁷

Tegasnya, tanggung jawab dan peranan setiap muslim di tengah-tengah kehidupan umat manusia lainnya merupakan suatu *mission sacre* (misi suci) untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan umat dan masyarakat di atas dasar *Tauhidullah* dan *Taqwallah* serta untuk mendasari dan mewarnai situasi kehidupan manusia dengan *al-Manhaj al-Illahi*, yaitu *Dinul Islam*. Dan perjuangan besar dan berat ini hanya dipercayakan Allah swt. kepada setiap muslim sepenuhnya untuk dilaksanakan dalam dan selama hidupnya di atas panggung kehidupan dunia yang fana ini.³⁸

c. Tujuan Dakwah

Segala sesuatu yang kita lakukan haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas agar kegiatan tersebut dapat berguna baik untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Suatu kegiatan tidak akan bermakna jika tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas.

Dakwah adalah kegiatan atau usaha yang bertujuan. Tujuan dakwah Islam adalah mengubah pandangan hidup seseorang. Dari perubahan

³⁷ Lihat misalnya QS. 3 :104

³⁸ Farid Ma'ruf Noor, *Dinamika...* Hal. 5-6.

pandangan hidup ini akan berubah pula pola pikir dan sikapnya.³⁹ Sedangkan menurut Rafiuddin dan Maman Abdul Djaliel, tujuan dari dakwah adalah untuk mempengaruhi cara berpikir manusia, cara merasa, cara bersikap dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁴⁰

Jadi dengan kata lain tujuan dari pelaksanaan dakwah adalah terimplementasikannya nilai-nilai ajaran Islam di dalam seluruh aspek kehidupan manusia sebagai *way of life* sehingga cara berfikir, cara merasa, dan cara berperilaku (aspek kognitif, afektif, psikomotorik) mereka sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

3. Partai Sebagai Media Dakwah

Kerangka teoritik dakwah dari perspektif politik, mengacu pada pendapat Zallum, ketika menganalisa perjuangan umat wajib berupa aktifitas politik. Secara sederhana perjuangan umat dalam upaya merubah masyarakat untuk menerapkan hukum sesuai aturan Allah swt. tidak mungkin terwujud tanpa partisipasinya dalam dunia politik.

Pada tahap tertentu pembinaan-pembinaan masyarakat umum merupakan sebuah langkah strategis bagi dakwah Islam. Pada tahap lain pendirian lembaga-lembaga sosial dan pendidikan merupakan langkah yang harus dilakukan dalam kerangka pembinaan umat secara lebih meluas dan lebih terstruktur. Demikian pula ketika berbagai syarat terpenuhi, di

³⁹ Mahfudh Syamsul Hadi, MR., dkk., *Rahasia Keberhasilan Dakwah KH Zaimudin MZ.*, (Surabaya : Ampel Suci, 1994). Hal. 133.

⁴⁰ Rafiuddin dan Maman Abdul Djaliel, *Prinsip & Strategi Dakwah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1997). Hal. 32.

antaranya adalah iklim kebebasan berpendapat dan berserikat, maka pendirian partai politik merupakan sebuah keniscayaan guna memperoleh legitimasi formal dalam aktifitas dakwah yang dilakukan.

Dengan demikian, pembentukan partai politik dalam rangka mewujudkan tatanan islami merupakan sebuah keharusan. Hanya saja politik di sini tidak berarti politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan semata. Aktifitas politik dalam kerangka pikir di atas adalah aktifitas yang mengacu pada pemeliharaan urusan umat sesuai hukum Islam. Sebab makna politik dalam konsepsi Islam adalah pemeliharaan dan pengaturan segala urusan umat manusia menurut hukum syara'.⁴¹

Partai politik wajib berjuang untuk menerapkan Islam secara keseluruhan baik hukum yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, akhlak maupun peraturan (perundang-undangan).

Perjumpaan Islam dengan politik bukanlah proses yang bersifat kebetulan. Jika dibaca melalui filsafat, bergulirnya sejarah politik Islam selalu dalam rangkaian dialektis antara kekuatan ide dengan tuntutan material dalam masyarakat. Dalam konteks sejarah politik ummat Islam di Indonesia, kekuatan ide yang menggerakkan umat Islam adalah keyakinan teologis bahwa Islam merupakan agama holistik yang tidak saja berurusan dengan persoalan ritus semata, tetapi juga sosial, yang salah satunya adalah politik.

⁴¹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam ; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1995). Hal. 46-47.

Karena politik dikonstruksi sebagai bagian dari agama, maka selalu kecenderungan melakukan "transendensi" terhadap aktifitas politik. Tidaklah mengherankan jika dalam realitas empirik, ekspresi umat Islam selalu menyandarkan pada apa yang dipandang sebagai otoritas suci, seperti penggunaan simbol-simbol agama. Namun penggunaan simbol-simbol agama ini tetap perlu dikritisi, sebab bisa jadi tidak lebih sebagai proses manipulasi dalam rangka memperluas basis konstituen partai politik tertentu, terlepas apakah partai itu secara legal-formal berasaskan Islam atau tidak.

Konstruksi teologis di atas berdialektika dengan kenyataan historis sosiologis umat Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia. Dari sudut pandang politik, jumlah yang besar tersebut jelas merupakan potensi sebagai basis legitimasi. Tapi yang lebih penting lagi, jumlah yang besar tersebut menjadi faktor motifatif yang bersifat empirik keterlibatan umat Islam dalam perpolitikan praktis.

Menggunakan partai sebagai media dakwah bukan berarti partai bergerak secara praktis melakukan dakwah berkeliling dengan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat, akan tetapi fungsi partai sebagai media dakwah lebih menekankan kepada sebuah titik perwujudan sebuah tatanan masyarakat yang Islami. Kegiatan tersebut lebih berwujud kepada aktifitas seperti advokasi atau pendampingan terhadap persoalan kerakyatan, di samping juga diselenggarakannya seminar-seminar dan kajian terhadap beberapa topik yang kemudian diarahkan dengan menggunakan pendekatan normatif yang berdasar pada ajaran Islam.

4. Gerakan Dakwah Islam

Gerakan dakwah Islam jika dilacak secara historis berasal dari seruan fundamental yang dikumandangkan oleh kaum puritanis, revivalis, dan reformis muslim. Seruan ini berisi ajakan kepada seluruh umat muslim sedunia untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Gerakan pemurnian ajaran-ajaran Islam yang antara lain dirintis oleh Muhammad Abduh ini, yang pada mulanya muncul di Saudi Arabia, telah memberikan inspirasi dan motivasi yang luas dan kuat bagi lahirnya gerakan-gerakan pemurnian Islam di beberapa negeri muslim Indonesia.⁴²

Gerakan gerakan Islam seperti yang dikemukakan oleh John Obert Voll dalam bukunya *Continuity and Change in the Modern World*, dibaginya dalam empat tipologi.⁴³ *Pertama*, bentuk adaptasionis yang didefinisikan Voll sebagai kesediaan kelompok muslim untuk menyelaraskan Islam dengan perubahan kondisi pragmatis. Contohnya adalah ajaran sinkretisme keagamaan dan pelaku tarekat Sufi.

Kedua, gaya konservatif. Perhatian kelompok konservatif yang paling awal adalah menegakkan kesempurnaan wahyu berkaitan dengan perubahan yang ada dalam komunitas muslim. Para pendukung gaya ini adalah mereka yang cenderung tidak percaya pada berbagai macam inovasi agama. Meskipun demikian, dalam perkembangannya, perlahan-lahan kaum konservatif menerima tatanan baru dan menjadi toleran untuk menerima

⁴² Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyah Dan Realitas Insaniyah*, Cet. 1, (Yogyakarta : Adi Wacana (Tiara Wacana Group) Yogya, 1999). Hal. 53.

⁴³ *Ibid.* Hal. 65-66.

keberagaman pemahaman agama baik pada level pemahaman tekstual maupun pemahaman kontekstual.

Ketiga, gaya fundamentalisme. Mereka mengikuti Al-Qur'an dan Al-Hadist secara ketat dan penuh semangat menolak berbagai macam bid'ah yang mereka anggap bertentangan dengan kebenaran doktrin Islam. Voll memasukkan kelompok Khawarij, Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abd Al-Wahab ke dalam kelompok ini.

Keempat, gaya yang lebih memperhatikan aspek personal dan individual Islam. Gaya ini cenderung mensubordinasi struktur legal dan institusi komunal pada aspek-aspek kesalehan pribadi dan kesucian individual.

Lepas dari tipologi gerakan dakwah di atas penulis mencoba menggambarkan tokoh gerakan dakwah Islam yang gigih dari Mesir yaitu Hasan Al-Banna dengan gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun.

Hasan Al-Banna merupakan pendiri Al-Ikhwan Al-Muslimun, anehnya, ia jarang menyebut Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai sebuah gerakan, namun Hasan Al-Banna lebih sering menyebutnya sebagai dakwah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Meskipun demikian, esensi dakwah yang dimaksud Hasan Al-Banna sama dengan gerakan Islam yang biasa diistilahkan untuk menyebut sebuah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Konsepsi gerakan Islam yang dimaksudkan Hasan Al-Banna adalah aktifitas masyarakat secara *Jama'i* (kolektif) dan terorganisir untuk

mengembangkan Islam. Dengan kata lain gerakan Islam adalah upaya terus menerus dan berkelanjutan, bukan hanya sekedar pembicaraan yang diucapkan, buku yang dikarang atau makalah-makalah yang diterbitkan, meskipun ini semua juga sangat diperlukan. Akan tetapi itu hanya merupakan bagian dari aktifitas, bukan dari gerakan itu sendiri.

Tugas dari gerakan Islam itu sendiri tidak lain kecuali untuk mengadakan pembaharuan Islam dan mengembalikannya sebagai aturan dan sistem kehidupan baik dalam bidang politik, pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, pendidikan, pemikiran, jurnalisme, kesusastraan, kebudayaan dan ekonomi sebagaimana ketika awalnya.

Dakwah Al-Ikhwan Al-Muslimun adalah dakwah yang hanya dapat dilukiskan secara integral oleh kata islamiyah. Bagi Al-Ikhwan Al-Muslimun, Islam adalah sistem nilai yang komprehensif mencakup seluruh dimensi kehidupan. Dia memberi petunjuk dalam kehidupan manusia dalam semua aspeknya, dan menggariskan formulasi sistemik yang akurat tentang hal itu. Islam memberi atas berbagai masalah vital dalam kehidupan manusia dan mengangkat harkat kehidupan manusia.

Dari pemahaman yang komprehensif dan utuh tentang Islam, maka Al-Ikhwan Al-Muslimun mampu merumuskan keuniversalan fikrahnya yang menyentuh semua aspek kehidupan. Karena universalnya gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun, maka berbagai kalangan menganggap gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun dengan berbeda-beda.

Ada yang menganggap Al-Ikhwan Al-Muslimun sebagai gerakan *dakwah salafiyah*, mengajak kembali kepada sumber ajaran Islam Al-Qur'an dan Sunnah, *thariqah sunniyah*, amalnya selalu berlandaskan sunnah Rasul, *haqiqah sufiyah*, asas kebaikan adalah kesucian jiwa, kejernihan hati, kontinuitas amal, berpaling pada ketergantungan kepada makhluk, *hai'ah siyasiyah*, gerakan politik, *jama'ah riyadhiyah*, kelompok oleh raga, *rabithah 'ilmiyah tsaqofiyah*, lembaga kajian dan penelitian pengetahuan, *syirkah iqtishadiyyah*, lembaga ekonomi, *fikrah ijtima'iyah*, organisasi pemikiran.

Anggapan-anggapan ini tidak ada yang salah, karena Al-Ikhwan Al-Muslimun mengerjakan semua itu, tujuan Al-Ikhwan Al-Muslimun yang telah disepakati adalah memimpin dunia dan membimbing manusia kepada ajaran Islam yang *syamil* (menyeluruh), di mana manusia tidak mungkin menemukan kebahagiaan kecuali bersama Islam.

G. METODOLOGI PENELITIAN

Metode adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.⁴⁴

Penelitian adalah usaha pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas, untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.⁴⁵

Adapun langkah penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

⁴⁴ Anton H. Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986). Hal. 6.

⁴⁵ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998). Hal. 14.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kasus (*case study*), yaitu penelitian yang meneliti permasalahan atau keadaan tertentu. Data yang dihimpun dipahami sebagai keseluruhan yang saling terkait satu sama lain dan merupakan bagian dari keseluruhan yang terintegrasi dalam suatu kondisi di mana permasalahan itu timbul.⁴⁶

2. Sumber Data

Penelitian kasus (*Case Study*) merupakan bagian dari penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan disebut juga dengan penelitian kaneah. Penelitian ini bertujuan menghimpun data dan informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Pengumpulan data dikerjakan dengan menggunakan tehnik wawancara atau angket pengamatan, observasi dan studi dokumen.⁴⁷

Berangkat dari hal tersebut, maka dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Partai Keadilan Sejahtera dari narasumber yang diwawancarai. Beberapa pihak yang akan kami wawancarai adalah ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta dan Dewan Syari'ah DPW Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta.
- b. Data sekunder yaitu semua informasi yang berkaitan dengan dinamika partai baik berupa buku-buku penunjang, pendapat para

⁴⁶ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Logos, 1997). Hal. 17.

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 14.

tokoh di luar partai maupun karya-karya lain yang menunjang. Data ini bisa didapat dari jurnal, brosur dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Adapun data yang dikumpulkan agar dapat memberikan penjelasan yang utuh tentunya berdasarkan jenis sumber data yang tepat dan terarah.

Oleh karena itu secara operasional dalam upaya mengumpulkan berbagai data yang ada penulis mencoba menggunakan teknik yang meliputi:

a. Interview

Teknik interview adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terhadap tokoh-tokoh partai, yang disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan tema yang diinginkan.⁴⁸

Teknik interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin. Menurut Sutrisno Hadi, dalam interview bebas terpimpin ini, penginterview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan (*frame work of question*) untuk disajikan, akan tetapi cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan irama (*timing*) interview sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan interviewer.⁴⁹ Interview ini diharapkan bisa berkembang karena dalam penyampaiannya bersifat

⁴⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta : Andi, 2001). Hal. 193.

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 193.

longgar tanpa keluar dari pedoman-pedoman daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Jadi yang dimaksud teknik pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda, buku, majalah, surat kabar, laporan program, peraturan, notulen rapat, dan sebagainya.⁵⁰

Dari pengertian di atas, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dokumentasi, artinya peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang bersifat teks, menjelaskan dan menguraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan arah penelitian.

Adapun dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a) Laporan Konfidensial, yaitu suatu laporan yang ditulis setelah peristiwa itu terjadi, yaitu laporan pertanggung jawaban atau buku catatan kegiatan yang sudah terlaksana dari Partai Keadilan Sejahtera.
- b) Laporan umum, yaitu laporan tentang suatu kegiatan yang ditulis atau disampaikan oleh suatu surat kabar, majalah, jurnal atau media lainnya mengenai sesuatu yang berhubungan dengan Partai Keadilan Sejahtera.
- c) Dokumen resmi Partai Keadilan Sejahtera.
- d) Buku-buku yang berhubungan dengan Partai Keadilan Sejahtera.

⁵⁰ *Ibid.* Hal.193.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah *deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif adalah langkah-langkah melakukan reinterpretasi objektif tentang fenomena-fenomena sosial yang terdapat dalam permasalahan yang diteliti.⁵¹

Penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau bisa dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵²

Metode deskriptif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran tentang korelasi antara partai dan dakwah dalam kerangka fungsi mediator. Sedangkan penggunaan kualitatif, yaitu metode penalaran yang bertolak dari penjelasan atau gambaran parsial dan aplikasi Partai Keadilan Sejahtera yang bersifat khusus, kemudian dikolaborasikan dalam suatu kesimpulan konseptual yang bersifat umum. Metode ini dipakai dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang konsep dan gerakan dakwah Partai Keadilan Sejahtera.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I adalah pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari pembahasan skripsi ini, memuat penegasan judul, latar belakang masalah,

⁵¹ Anton Bakker, *Metode ...* Hal. 54.

⁵² Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1989). Hal. 3.

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II akan dideskripsikan tentang gambaran umum Partai Keadilan Sejahtera yang meliputi sejarah, asas, visi, misi partai dan prinsip dasar partai yang sekaligus menjadi karakter dari Partai Keadilan Sejahtera serta kepemimpinan dan struktur organisasi, yang dilanjutkan dengan deskripsi tentang Partai Keadilan Sejahtera DPW Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi sejarah dan struktur organisasi.

Dalam BAB III dijelaskan mengenai gambaran umum mengenai partai dan dakwah islamiyah kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai korelasi keduanya dalam kerangka hubungan partai sebagai media dakwah.

Bab IV dideskripsikan konsep dan gerakan dakwah Partai Keadilan Sejahtera, dan dideskripsikan pula gerakan dakwah Partai Keadilan Sejahtera DPW Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V merupakan penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah tertuang dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi partai politik dalam Islam dalam bahasa *profetik* adalah menunaikan tugas *amar ma'ruf nahi munkar*. Signifikansi mendirikan partai dalam konteks dakwah adalah sebagai sarana untuk melaksanakan kontrol, mengoreksi dan menghadapi kezaliman kekuasaan, mengembalikan kejalan yang benar atau menggantikannya untuk diduduki orang lain yang lebih amanah dan jujur. Jadi institusi partailah yang mampu secara efektif melaksanakan tugas menasehati serta membawa misi *amar ma'ruf nahi munkar*.
2. Konsep dakwah Partai Keadilan Sejahtera terefleksikan dalam slogan "partai dakwah" yang menjadi identitasnya. Partai dakwah berarti bahwa partai bukanlah kelanjutan logis dari kehendak untuk mengejar dan mempertahankan kekuasaan politik, melainkan kelanjutan dari dakwah islamiyah. Dengan demikian, bagi kalangan Partai Keadilan Sejahtera, mendirikan partai politik sama dan sebangun maknanya dengan upaya memasuki dimensi politik sebagai bagian dari dakwah islamiyah. Tujuan luhur dari semua ini adalah aktualisasi universalitas Islam dalam rangka

mewujudkan keseimbangan hidup manusia dan masyarakat dalam berbagai dimensinya.

Partai Keadilan Sejahtera menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan untuk merealisasikan program nyata partai dan pembaharuan ajaran Islamnya. Untuk itu Partai Keadilan Sejahtera menggagas metode tersendiri bagi pengaplikasian Al-Qur'an dalam nilai-nilai ilahiyah yang berbeda dari partai-partai lainnya. Letak perbedaan yang paling signifikan adalah pembentukan akhlakul karimah umat Islam secara universal. Langkah tersebut berpijak pada beberapa prinsip yaitu mewujudkan bersama masyarakat madani di Indonesia dengan menampilkan Islam dalam wajah rahmatan lil 'alamin, memperluas demokratisasi (*tausi'atul dimokratiyah*), memelopori reformasi total di segala bidang kehidupan (*tausi'ul islahiyah*). Pada prinsip mewujudkan masyarakat madani di Indonesia Partai Keadilan Sejahtera tidak berpegang pada makna *civil society* yang berasal dari proses sejarah masyarakat Barat, yang muncul bersamaan dengan proses modernisasi, terutama pada saat terjadinya transformasi dari masyarakat feodal agraris menuju masyarakat industrialis. Sebagai gagasan, bisa dikatakan munculnya Partai Keadilan Sejahtera melakukan sebaliknya. Yaitu dengan membawa masyarakat pada pengertian bahwa agama akan mengantarkan kepada kemerdekaan yang hakiki dan keadilan yang merata. Seperti dalam perjalanan Nabi Muhammad ketika memperjuangkan masyarakat Madinah yang merupakan upaya persatuan universal yang tertuang dalam piagam Madinah (*Madinah Charter*).

Dalam terminologi memperluas demokrasi Partai Keadilan Sejahtera memandang sangat perlu mewujudkan prinsip-prinsip politik yang tertera dalam Al-Qur'an yaitu nilai keadilan, kesamaan dan musyawarah. Dalam prinsip orientasi reformatif Partai Keadilan Sejahtera berupaya mengangkat hukum-hukum Tuhan yang terdapat dalam ajaran Islam untuk mengubah orientasi dan makna politik yang ada. Dalam perspektif negara modern idealisme seperti itu sebanding dengan teori yang pernah dilontarkan oleh ibn Khaldun dengan teori *Madinah al Fadhilah*. Jika hal itu terwujud rumusan yang paling tepat untuk mendiskripsikannya adalah *baladatum thoyyibatun wa robbun ghofur*, yaitu negeri yang baik dan Tuhan yang pengampun. Dalam prinsip ini pula Partai Keadilan Sejahtera berusaha menjelaskan dengan pasti bahwa Islam selaras dengan perkembangan masa depan dan kehidupan manusia. Demikian pula dalam upayanya menghapus *image* bahwa Islam dan negara (politik) memiliki hubungan dikotomik.

B. SARAN

1. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa politik diidentikan dengan suatu hal yang kotor sehingga masyarakat berpikir dua kali untuk lebih jauh terjun di dalamnya. Kondisi ini disebabkan oleh banyak hal diantaranya perilaku politik, yang notabene berasal dari partai, tidak mengindahkan etika politik. Oleh karena itu, aktifis partai Islam memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk memperbaikinya. Karena kehidupan berpolitik

merupakan sebuah *sunnatullah* yang tentu saja harus mengejawantahkan nilai-nilai etika Islam.

2. Gejala umum masyarakat menampakkan sikap apatis, apriori akan ekstensi partai. Jika dicermati sikap-sikap ini lahir dari kekurangan partai dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi partai politik. Posisi tawar berupa program yang jelas, terarah dan terencana serta menyentuh kebutuhan masyarakat haruslah menjadi prioritas, karena masyarakat saat ini membutuhkan hal-hal yang pasti.
3. Eksklusifitas perlu dipertahankan karena hal itu dibutuhkan untuk menjaga fitnah dan menyaring kader-kader potensial.
4. Ekstrimitas dan antagonisme serta radikalisme adalah proses yang mengkerdilkan eksistensi partai Islam. Untuk menghindarkannya, sebaiknya rasionalitas berpikir dalam memahami agama ditempatkan dalam porsi yang ideal dengan menggunakan pendekatan substantif serta bersatunya kekuatan Islam dengan menghargai pluralitas dijadikan standar aktifitas.

C. PENUTUP

Pada akhirnya penulis mengucapkan *Alhamdulillah* sebagai wujud rasa syukur atas limpahan rahmat dan hidayah Ilahi Robbi sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan segala kekurangannya.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis berharap *sumbang sih* kritik dan saran konstruktif dari pembaca yang budiman sebagai upaya perbaikan menuju karya yang lebih baik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1971, Madinah Al-Munawaroh : Kementrian Agama Islam Kerajaan Saudi Arabia.
- Ahmad, Amrullah (ed), 1983, *Dakwah & Perubahan Sosial*, Yogyakarta : Prima Duta.
- Amal, Ichlasul (ed.), 1996, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Yogyakarta : PT Tiara Wacana.
- _____), 1996, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, edisi revisi, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya.
- Amir, Zainal Abidin, 2003, *Peta Islam Politik; Pasca-Soeharto*, Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Amirudin, M. Hasbi, 2000, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta : UII Press.
- Anshari, Isa, 1995, *Mujahid Dakwah*, Bandung : PT. Diponegoro.
- Arkoun, Muhammad, 1996, *Rethinking Islam*, Yogyakarta : LPMI-Pustaka Pelajar.
- Aziz, Jum'ah Amin Abdul, 2000, *Fiqh Dakwah : Studi Atas Berbagai Prinsip Dan Kaidah Yang Harus Dijadikan Acuan Dalam Dakwah Islamiyah*, Solo: Era Intermedia.
- Bachtiar, Wardi, 1997, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta : Logos.
- Bakker, Anton H., 1986, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bambang Cipto, 1996, *Prospek Dan Tantangan Partai Politik*, Cet. I Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budiadjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Poltik*, Cet. XIX, Jakarta : PT. Gramedia pustaka utama.
- _____), 1998, *Partisipasi Dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*, edisi revisi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Chaidar, Ali, 1998, *Pemilu 1999 Pertarungan Ideologis Partai-Partai Islam Versus Partai-Partai Sekuler*, Jakarta : Darul Falah.

- Citra dan Wacana Tentang Partai Keadilan Sejahtera*, 2004, Tim Sekretariat DPW Partai Keadilan Sejahtera DIY.
- Damanik, Ali Said, 2002, *Fenomena Partai Keadilan Refleksi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia*, Jakarta : Teraju.
- Dulu Dakwah Kampus, Kini Dakwah Parlemen, *Tempo*, 18 Januari 1999.
- Furkon, Aay Muhamad, 2004, *Partai Keadilan Sejahtera; Ideology Dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, cet. 1, Jakarta : Teraju.
- Ghani, Soelistyani Abdul, 1987, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta : Ghalia Indonesia).
- Hadi, Mahfudh Syamsul, MR., dkk., 1994, *Rahasia Keberhasilan Dakwah KH Zainudin MZ*, Surabaya : Ampel Suci.
- Hadi, Sutrisno, 2001, *Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta : Andi.
- Huntington, Samuel, 1968, *Political Order In Changing Societies*, New Haven and London : Yale University Press.
- Hashmy, Ali, 1994, *Dustur Dakwah Menurut Al-Quran*, Jakarta : PT. Bulan Bintang.
- Imawan, Riswanda, 1997, Kata pengantar: *Membedah Poitik Orde Baru; Catatan Dari Kaki Merapi*, Agus dan Kuswaidi Syafi'ie (ed.), cet 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Isa, Muhammad, 2000, *Partai Keadilan Dalam Perspektif Politik Islam (Studi Atas AD/ART Partai Keadilan)*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga.
- Ismail, Faisal, 1999, *Islam Idealitas Ilahiyah Dan Realitas Insaniyah*, cet 1, Yogyakarta, Adi Wacana (Tiara Wacana Group) Yogya.
- Jindan, Khalid Ibrahim, 1995, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, diterjemahkan oleh Masrohin, Surabaya : Risalah Gusti.
- Jurnal DPW Partai Keadilan DIY, Edisi 3/1, 25 Desember 1998-8 Januari 1999.
- Khan, Qamaruddin, 1983, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Bandung : Pustaka.
- Kuntowijoyo, 1997, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung : Mizan.

- Kurniadi, Yadi, 2001, *Komunikasi Politik Islam: Studi Analisis Dakwah Politik Partai Keadilan DIY*, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) DPW Partai Keadilan DIY, Masa Bhakti September 1998-Maret 2001.
- Luth, Thohir, 1999, *M. Natsir : Dakwah dan Pemikirannya*, cet.1, Jakarta : Gema Insani Press.
- Maududi, Abu Al-A'la, 1996, *Hukum Dan Konstitusi, Sistem Politik Islam*, Bandung : Mizan.
- Moloeng, Lexy J., 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mulkhan, Abdul Munir, 1996, *Ideologisasi Gerakan Dakwah*, Yogyakarta : SIPRESS.
- Nadzir, Moh., 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Natsir, M., 2001, *Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Media Dakwah.
- _____, tt, *Fiqid Dakwah*, Solo: Ramadani.
- Noor, Farid Ma'ruf, 1981, *Dinamika & Akhlak Dakwah*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Novianto, Khalid, 1999, *Era Baru Indonesia; Sosialisasi Pemikiran Amin rais, Hamzah Haz, Nurmahmudi, Matori Abdul Jalil, Yusril Ihza Mahendra*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prent, K CN, dkk, 1969, *Kamus Latin Indonesia*, Semarang, Jajasan Kanisius.
- Pusat dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke 3, Jakarta : Balai Pustaka.
- Rafi'uddin, dan Maman Abdul Djaliel, 1997, *Prinsip & Strategi Dakwah*, Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Rais, M. Amin, 1991, *Cakrawala Islam*, Bandung : Mizan.
- _____, 1999, *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*, Cet. X, Bandung : Mizan.

_____, 1984, *Gerakan-Gerakan Islam Internasional Dan Pengaruhnya Bagi Gerakan Islam Indonesia*, Prisma, 'Arah Baru Islam: Suara Angkatan Muda', no. ekstra, tahun XIII.

Rakhmat, Jalaludin, tt, *Islam & Era Informasi*, dalam Dedy Jamaluddin Malik & Idi Subandy Ibrahim (ed), *Hegemoni Budaya*, Yogyakarta : Bentang Budaya.

Republika, 5 Mei 2003.

Salim, Arsekal, 1999, *Partai Islam Dan Relasi Agama-Negara*, Jakarta : Pusat penelitian IAIN Syarif Hidayatullah.

Salim, Hairus, dkk (ed), 1999, *Tujuh Mesin Pendulang Suara; Perkenalan Prediksi Harapan Pemilu 1999*, Jogjakarta : LKiS.

Salim, Peter dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press.

Sekilas Partai Keadilan, diterbitkan oleh Sekretariat DPW Partai Keadilan DIY.

Syukir, Asmuni, 1983, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya : Al Ikhlas.

Umaldi Rodi, 1984, *Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Polittik Islam Tingkat Nasional*, Jakarta : Integrita Press.

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik, Jakarta : BP Cipta Jaya, 2003.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA